

PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KARAKTERISTIK PEMDA DAN OPINI AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DI INTERNET

Siti Nurhidayati¹, Rolia Wahasusmiah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang
email : sitipwesek123@gmail.com¹, rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id²

Abstract

Aksesibility index is an index that measures the level of disclosure of local government financial information that uses internet media. The purpose of this study is to analyze the performance of local governments in disclosing financial information on internet media. This research is descriptive in nature, namely research that attempts to describe and interpret the results of the accessibility index based on nine criteria, local revenue (PAD), dependency level (DAU), regional expenditure (BD), intergovernmental revenue (DAPER), total assets (ASSET), population (POP), regional status (STAT) and Audit Opinion (OPINI). The results of this study prove the disclosure of financial information on the internet in 109 district / city governments on the island of Sumatra has been said to be good, namely 37.5% in whole. This is because there are access index items that have not been fully expressed.

Keywords : PAD, DAU, BD, DAPER, ASSET, POP, STAT, OPINI

1. PENDAHULUAN

Perkembangan yang cepat dalam dunia internet membawa perubahan dalam penyebaran informasi. Banyak pemerintah daerah telah menggunakan internet sebagai alat komunikasi untuk menyediakan informasi mengenai pemerintah daerah, termasuk penyebarluasan informasi keuangan melalui *Internet Financial Reporting (IFR)*. *Internet Financial Reporting (IFR)* adalah sarana untuk melaporkan informasi keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi internet. IFR muncul dan berkembang sebagai media yang paling cepat untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Keuangan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141/KMK.07/2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satunya dengan menggunakan media internet. Internet adalah sarana yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara efisien dan mempengaruhi aspek komunikasi dari laporan keuangan. Pemilihan *Internet* sebagai media publikasi informasi keuangan daerah memiliki beberapa keunggulan terutama memudahkan bagi para stakeholder dalam mengakses laporan keuangan. Kemudahan dalam mengakses laporan keuangan tersebut dapat mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah, hal ini akan mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi kepada masyarakat. Pemanfaatan media Internet ini dapat membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah daerah merupakan salah satu instansi yang menjadi sorotan oleh masyarakat terkait dengan Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah iklim pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemda menyusun laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dan

menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan pelaksanaan Pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat mengaksesnya.

Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan khususnya pemerintah daerah dan faktor yang mempengaruhinya penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pengungkapan dalam laporan keuangan akan menggambarkan tentang perbedaan praktik pengungkapan yang telah dilakukan oleh entitas pemerintah daerah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menggambarkan kondisi pemerintah daerah tersebut pada periode pelaporan. Selain itu, pengungkapan juga merupakan faktor penting dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas. Ryan dkk, (2002) dalam Pandansari (2016) menguji kualitas laporan tahunan pemerintah daerah Queensland, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kualitas pelaporan, dengan menggunakan model *Local Government Accountability (LGA) Index*. Secara rata-rata, kualitas pengungkapan meningkat dari tahun ke tahun dan pengungkapan mengenai informasi keuangan di pemerintah daerah *Queensland* lebih lengkap jika dibandingkan dengan pengungkapan informasi non-keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hiola dkk (2017). Tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen yaitu kinerja keuangan yang diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), opini audit dan lingkungan politik. Sedangkan Peneliti menambah beberapa variabel yang di asumsi berpengaruh pada pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemda, diantaranya: tingkat ketergantungan, belanja daerah, *intergovernmental revenue*, total aset, jumlah penduduk, dan status daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan di internet hal ini sebagai tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahannya serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber referensi dalam memberikan kontribusi pengetahuan serta untuk perkembangan penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang membahas hubungan antara prinsipal dengan agen. Hubungan agensi terjadi ketika prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini menyebabkan 2 (dua) permasalahan yaitu informasi asimetris dan konflik kepentingan. Informasi asimetris terjadi karena agen mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal sehingga agen dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) dalam Setyaningrum dan syafitri (2012) bahwa teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Hendriyani dan Tahar (2015) menyatakan Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa

yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya. Pendapatan daerah yang bersumber hasil pemungutan pajak daerah, hasil redribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Puspita dan Martani (2012) menyebutkan bahwa rasio PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Hendriyani dan Tahar (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kekayaan suatu daerah tidak akan secara otomatis melakukan pengungkapan informasi yang tinggi pula. Madelia dkk (2016) mengungkapkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kekayaan suatu daerah tidak akan secara otomatis melakukan pengungkapan informasi yang tinggi pula. Semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hiola dkk (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan PAD terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* pemda, artinya kinerja keuangan yang baik dapat mendorong pemerintah daerah melakukan pengungkapan informasi keuangan di *website* resminya. Sedangkan menurut Wilopo (2017) menyatakan Hasil penelitiannya yaitu rasio PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet oleh Pemda. Dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

2.2.2. Tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

Tingkat ketergantungan adalah seberapa besar pemerintah daerah menjalankan program kerja yang telah dirancang dengan bantuan dari pemerintah pusat kepada pamarintah daerah. Robbin dan austin (1987) dalam Setyaningrum dan Syafitri (2012) digambarkan sebagai *reliance on federal funds*. *Reliance on federal funds* menunjukkan seberapa besar jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai operasionalnya. Madelia dkk (2016) mengungkapkan bahwa Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani dan Tahar (2015) Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan, karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan opini wajar, bukan dalam hal kualitas pengungkapan. Sedangkan Pandansari (2016) hasil penelitian diketahui bahwa variabel tingkat ketergantungan daerah terhadap DAU berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Puspita dan Martani (2012) menyatakan ketergantungan daerah (DAU) berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan. Hilmi dan Martani (2012) ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan pemerintah provinsi. Sedangkan Putri (2015) hasil penelitiannya Tingkat Ketergantungan daerah pengaruh negatif yang signifikan terhadap luas pengungkapan LKPD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Pemerintah daerah yang tergantung pada transfer pemerintah pusat cenderung memberikan pengungkapan yang lebih sedikit.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet oleh Pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tingkat ketergantungan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

2.2.3. Belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu priode anggaran. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Hendriyani dan Tahar (2015) mengemukakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi belanja yang dikeluarkan maka semakin banyak pula bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan dorongan pengungkapan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sebagai wujud pengabdian. Sedangkan menurut Wilopo (2017) dan Puspita dan Martani (2012) mengemukakan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk Belanja Daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Belanja Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet

2.2.4. Intergovernmental revenue terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

Intergovernmental Revenue merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Penelitian setyaningrum dan syafitri (2012) Variabel *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan, tidak sesuai ekspektasi penelitian. Semakin tinggi *intergovernmental revenue* justru tidak memberikan tekanan kepada Pemda untuk meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD. Pengaruh negatif antara *intergovernmental revenue* dan tingkat pengungkapan LKPD diduga karena pemerintah pusat selama ini kurang memberikan kontrol terhadap penggunaan dana perimbangan sehingga Pemda tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan pengungkapan dalam LKPD mereka. Yuliant (2017) bahwa Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk *Intergovernmental Revenue* terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet oleh Pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Intergovernmental Revenue mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet

2.2.5. Total Aset terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

Total aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Madelia dkk (2016) menyatakan Total aset berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya jika semakin besar total aset maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin tinggi dan jika semakin kecil total aset maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin rendah. Putri (2015) mendapatkan bahwa ukuran daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan Pemda. Hal ini berarti bahwa daerah dengan aset daerah yang besar akan mengungkapkan laporan keuangan Pemda yang lebih luas. Pemerintah Daerah yang berukuran besar berarti bahwa Pemda tersebut memiliki aset daerah yang lebih besar. Besarnya aset daerah tersebut berarti pula bahwa Pemda memiliki item-item penyusun aset seperti aset tetap maupun aset lancar yang lebih banyak. Kondisi demikian memungkinkan pemerintah daerah akan mengungkapkan LKPD yang lebih luas. Menurut Heriningsih dan Ruserlistyani (2013) dan Hilmi & Martani (2012) total aset menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini dikarenakan dengan jumlah aset yang dimiliki pemerintah yang cukup besar, namun banyak permasalahan yang dalam pengelolaan asetnya tersebut, dan pemerintah daerah kurang memahami dalam pelaporannya. Sehingga sangat mungkin terjadi dalam pengujian hipotesis penelitian ini bahwa total aset secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila berdasarkan hasil dari model persamaan regresi nya maka terdapat hubungan negatif antara total aset dengan tingkat pengungkapan dalam LKPD. laporan keuangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk Total Aset terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet oleh Pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Total Aset mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

2.2.6. Jumlah Penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintahan. Daerah dengan penduduk besar didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan tingkat pengungkapan (Hilmi, 2011). Afryansyah dan Haryanto (2013) menyatakan jumlah penduduk, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Padahal, berdasarkan sampel yang diteliti, rata-rata jumlah penduduk suatu daerah di Indonesia adalah sebesar 856.987 jiwa. Angka ini sebenarnya adalah jumlah yang cukup besar dan menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi yang seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pengguna *internet* di suatu daerah. Akan tetapi, faktor banyaknya jumlah penduduk ini ternyata tidak cukup mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya di *internet*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan teori agensi dimana seharusnya *agent* pada suatu kota yang lebih besar akan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi akuntansinya untuk mengendalikan biaya keagenan dalam rangka memperkecil asimetri informasi dengan *principal*. Hasanah (2016) menemukan Jumlah penduduk tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di *website*. Jumlah penduduk yang banyak tidak mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi keuangan di *website*, karena jumlah penduduk yang banyak namun tidak memiliki daya pikir yang baik dan kritis terhadap kinerja pemerintah maka permintaan atas laporan keuangan akan rendah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk Jumlah Penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet oleh Pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

2.2.7. Status Daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Status daerah yang merupakan saah satu pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi kontrol sosial pada suatu daerah. Status daerah yang merupakan saah satu pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi kontrol sosial pada suatu daerah. Abdullah (2004) dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2012) Menyatakan bahwa status daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Surhardjanto dan Yulianingtyas (2012) status daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk Status Penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet oleh Pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Status Penduduk mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan di Internet.

2.2.8. Opini Audit terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Opini audit adalah suatu pernyataan profesional dari seorang auditor tentang kewajaran informasi keuangan yang di sajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Menurut Wau (2015), Hendriyani & Tahar (2015) dan Heriningsih & Ruserlistyani (2013) bahwa Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan karena BPK akan memberikan saran kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki temuan-temuan audit yang mereka temukan, dengan adanya perbaikan maka opini yang diberikan akan mendapatkan opini wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Menurut Putri (2015) mendapatkan bahwa opini BPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan Pemda. Hal ini berarti bahwa daerah yang mendapatkan opini WTP akan mengungkapkan laporan keuangan Pemda yang lebih luas. Opini diberikan oleh BPK sebagai penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bebas dari salah saji. Adanya opini WTP berarti bahwa Pemda memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik menyajikan laporan keuangan Pemda. Dengan adanya opini tersebut maka Pemerintah daerah akan berusaha memberikan penyajian LKPD yang lebih luas untuk memberikan kesan yang baik mengenai kinerja Pemda tersebut. Menurut Sari dkk (2015) bahwa opini audit yang besar pada periode lalu akan mendorong K/L untuk menindaklanjuti temuan audit sehingga mengurangi temuan audit pada periode selanjutnya yang berdampak pada tingkat pengungkapan yang tinggi dan probabilitas perolehan opini audit WTP meningkat. Semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L yang tercermin dari tingkat pengungkapan yang tinggi sehingga peluang opini yang diperoleh K/L semakin baik sesuai Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk Opini Audit terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet oleh Pemda. dengan begitu, uraian yang dijabarkan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Opini Audit mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera. Populasi penelitian ini menggunakan pemerintah daerah yang ada di pulau sumatera. Dalam penelitian ini, sampel yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Metode sampel tersebut membatasi pemilihan sampel berdasarkan kriteria:

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Tahapan Eliminasi Sampel	Jumlah
1.	Seluruh Pemda di pulau sumatera yang sudah diaudit oleh BPK TA 2016	154
2.	Website pemerintah daerah yang aktif dan tidak dalam kondisi perbaikan (<i>under construction</i>) ataupun eror.	(18)
3.	Tidak memiliki kelengkapan data dan informasi keungan mengenai variabel-variabel yang diteliti.	(26)
Jumlah sampel		109

Berdasar tabel diatas jumlah populasi dalam penelitian ini ada 154 pemerintah kabupaten/kota yang ada di pulau sumatera tahun 2016. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 109 pemerintah kabupaten.kota.

3.2. Variabel independen

Variabel bebas (*independent*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*). Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel Pendapatan asli daerah (PAD) diukur dengan membagi Total pendapatan asli daerah yang dimiliki setiap daerahnya masing-masing dengan total realisasi anggaran pendapatan.

$$PAD = \frac{\text{total pendapatan asli daerah}}{\text{total realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\% \dots 1$$

2. Tingkat Ketergantungan

Pada penelitian variabel Tingkata ketergantungan mengacuh pada penelitian yang dilakukan oleh Pandansari (2016). Tingkat ketergantungan dapat diukur dengan membagi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimiliki suatu daerah dengan total realisasi anggaran pendapatan.

$$\text{tingkat ketergantungan} = \frac{\text{dana alokasi umum (DAU)}}{\text{total realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\% \dots 2$$

3. Belanja Daerah

variabel Belanja daerah di ukur dengan Log dari realisasi belanja daerah.

$$\text{belanja daerah} = \text{Log}(\text{realisasi belanja daerah}) \dots 3$$

4. Intergovernmental Revenue

Veriabel *intergovernmental revenue* dapat diukur dengan membagi total dana perimbangan suatu daerah dengan total realisasi anggaran pendapatan.

$$\text{intergovernmental revenue} = \frac{\text{total dana perimbangan}}{\text{total realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\% \dots 4$$

5. Total Aset

Total aset di ukur menggunakan Ln total aset dan rumus ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspit dan Martni (2012).

$$\text{aset daerah} = \text{Ln}(\text{total aset daerah}) \dots 5$$

6. Jumlah Penduduk

Variabel jumlah penduduk diukur dengan menggunakan total jumlah penduduk yang digunakan karena jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah.

$$\text{jumlah penduduk} = \text{Ln}(\text{jumlah jiwa}) \dots 6$$

7. Status Daerah

Status daerah diukur dengan menggunakan skor. Jika status daerah adalah Kabupaten, diberi skor 1 (satu) dan jika status daerah adalah Kota, diberi skor 2 (dua).

8. Opini Audit

Opini audit diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan mengurutkan peringkat dari opini yang tertinggi sampai peringkat terendah karena peringkat yang tertinggi dianggap opini yang paling baik. Opini audit yang diurut sesuai dengan peringkat terdiri dari: 4 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 3 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 2 untuk opini Tidak Wajar (TW), dan 1 untuk opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

3.3. Variabel dependen

Variabel terikat (*dependen*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independen*). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi keuangan di Internet Pemda. Penelitian ini berkaitan dengan dimana pengguna dapat mencari dan melihat data informasi keuangan yang disediakan pada situs resmi pemerintah daerah. penelitian ini menggunakan indeks aksesibilitas untuk mengukur tingkat kemudahan dalam memperoleh informasi dalam keuangan pada situs resmi pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Styles dan Tennyson (2007) dalam Medina (2012). Peneliti mengadaptasi beberapa yang disesuaikan dengan ketersediaan data informasi keuangan daerah (APBD/LKPD). Karena objek penelitian ini di lakukan di indonesia yang harus memenuhi SAP. Sedangkan penelitian sebelumnya melihat data CAFR (Styles dan Tennyson, 2007). Pengungkapan ini adalah tingkat pemberian informasi keuangan oleh pemerintah daerah di *Internet*. Variabel ini akan diukur dengan metode *Accessibility index value*, Pada penelitian ini, indeks aksesibilitas dihitung berdasarkan ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi setiap daerah di pulau sumatera dan hasil penjumlahan maksimal 13 poin untuk setiap daerah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui laporan-laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui website Badan Pusat

Statistik (BPS), Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi tinjauan pustaka dalam membangun hipotesis dan sekaligus mengujinya, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah ataupun populer, koran, serta internet.

3.5. Teknik Analisis

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. pemilihan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Teknik analisis kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat di dalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perkembangan pengungkapan informasi keuangan di internet oleh Pemda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis regresi linier berganda (*multivariate regression*) merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$\text{DISC}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{BD} + \beta_4 \text{DAPEr} + \beta_5 \text{ASSET} + \beta_6 \text{POP} + \beta_7 \text{STAT} + \beta_8 \text{OPINI} + e$$

Keterangan :

α	= konstanta
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Tingkat Ketergantungan
BD	= Belanja Daerah
DAPEr	= <i>intergovernmental revenue</i>
ASSET	= Total Aset
POP	= Jumlah Penduduk
STAT	= Status Daerah
OPINI	= Opini Audit
e	= koefisien error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 2
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,321 ^a	,103	,031	1,672027	2,026

a. Predictors: (Constant), OPINI, STAT, DAPER, ASSET, BD, PAD, POP, DAU

b. Dependent Variable: Informasi Keuangan

Sumber : Data diolah Penulis (2018)

Tabel 2 menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,103 yang memiliki arti bahwa hanya 10.3%

pengungkapan informasi keuangan di internet dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah (PAD), tingkat ketergantungan (DAU), belanja daerah (BD), *intergovernmental revenue* (DAPER), total aset (ASSET), jumlah penduduk (POP), status daerah (STAT) dan opini audit (OPINI). Sedangkan sisanya 89.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4.2. Uji statistika t

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali (2016) bahwa uji stastika t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,134	4,144		,515	,608
PAD	-,081	,039	-,206	-2,056	,042
DAU	-2,350	1,324	-,200	-1,775	,079
BD	-,218	,194	-,116	-1,119	,266
DAPER	,254	,485	,052	,523	,602
ASSET	,175	,088	,199	1,981	,050
POP	-,072	,200	-,037	-,358	,721
STAT	,865	,413	,221	2,096	,039
OPINI	,252	,220	,113	1,145	,255

a. Dependent Variable: Informasi Keuangan
Sumber : Data diolah Penulis (2018)

Dari hasil uji statistik t di atas secara parsial nilai signifikan 1%, 5% dan 10% dapat dilihat pada tabel 3 seingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,042 < level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara PAD terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

2. Variabel Tingkat Ketergantungan (DAU)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,079 < level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,10$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara DAU terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

3. Variabel Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,266 > level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikansi antara BD terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

4. Variabel *Intergovernmental Revenue* (DAPER)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,602 > level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikansi antara DAPER terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

5. Variabel Total Aset (ASSET)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,050 < level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara ASSET terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

6. Variabel Jumlah Penduduk (POP)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,721 > level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikansi antara POP terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

7. Variabel Status Daerah (STAT)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,039 > level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara STAT terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

8. Variabel Opini Audit (OPINI)

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi $0,255 > level\ of\ significant\ (\alpha)\ 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikansi antara OPINI terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

4.3. Uji Statistika F

Uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam mekasir nilai aktual secara statistik Ghozali (2016). Layak di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4
Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32,121	8	4,015	1,436	,191 ^b
Residual	279,568	100	2,796		
Total	311,688	108			

a. Dependent Variable: Informasi Keuangan

b. Predictors: (Constant), OPINI, STAT, DAPER, ASSET, BD, PAD, POP, DAU

Sumber : Data diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai F hitung sebesar 1,436 dengan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,191. Karena nilai probabilitas lebih besar 1%, 5% dan 10% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di internet atau dapat dikatakan variabel PAD, DAU, BD, DAPER, ASSET, POP, STAT, dan OPINI tidak berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependennya yaitu pengungkapan informasi keuangan di internet.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa hipotesis pertama di tolak. Hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Dengan nilai signifikan sebesar 0,42 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Maka, berdasarkan hasil ujian hipotesis tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hendriyani dan Tahar (2015), Hiola dkk (2017) dan Wilopo (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya Madelia dkk (2016) dan Puspita & Martani (2012). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan juga dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi daerah, sehingga Pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada informasi keuangannya sebagai tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat luas.

Laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada *principal* (Godfrey, 2007). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Hal ini didukung Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *e-government* mendorong segenap Pemda untuk mengoptimalkan teknologi dan informasi. Internet sebagai salah satu media berbasis teknologi dan informasi yang andal dalam penyampaian informasi keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa seharusnya semakin tinggi PAD Pemda maka akan semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

4.4.2. Tingkat Ketergantungan (DAU) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan (DAU) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, dan hipotesis ini di tolak. Dengan nilai signifikan sebesar 0,079 lebih kecil dari 0,10 ($\alpha = 10\%$) Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hendriyani dan Tahar (2015), Putri (2015), Setyaningrum & Syafitri (2012), dan Pandansari (2016), bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Madelia dkk (2016) dan Hilmi & Martani (2012). Artinya semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada dana DAU dari pemerintah pusat maka Pemda cenderung memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih sedikit, karena pemda yang memiliki dana DAU yang besar menggambarkan bahwa daerah tersebut tergantung kepada pemerintah pusat. Jika semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada dana DAU dari pemerintah pusat maka Pemda akan sering mengungkapan informasi keuangan di internet.

4.4.3. Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet

Hasil hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Belanja Daerah (BD) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, dan hipotesis ini ditolak karena pada uji t signifikan sebesar 0,266 lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini sejalan dengan penelitian Wilopo (2017) dan Puspita dan Martani (2012) mengemukakan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya Hendriyani & Tahar (2015). UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa belanja yang tinggi tidak mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, sehingga belanja secara otomatis tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada situs resmi Pemda.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemda yang memiliki belanja daerah yang tinggi tidak secara otomatis akan melakukan pengungkapan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan dorongan pengungkapan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sebagai wujud pengabdian. belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Apabila Pemda mampu melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat maka artinya Pemda memiliki

kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik. Jadi dapat dianalogikan bahwa semakin besar belanja daerah tidak secara otomatis semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi pelayanan yang dilakukan Pemda.

4.4.4. *Intergovernmental Revenue* (DAPER) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil hipotesis ke empat (H4) menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue* (DAPER) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, dan hipotesis ini di tolak karena pada uji t nilai signifikan sebesar 0,602 lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang di lakukan Yuliant (2017) bahwa Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri (2012). Artinya semakin besar *intergovernmental revenue* yang di gambarkan dari dana perimbangan tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk meningkatkan mengungkapkan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pemerintah pusat. Dana perimbangan ini selain dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk megurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antara daerah.

Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dengan pembatasan operasi tersebut. Pemerintah pusat memantau apa yang dilakukan Pemda dan tingkat pencapaian kinerja alokasi dana umum dan dana khusus dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan menunjukkan hubungan yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerinta daerah dimana dalam penerapan desentralisasi fiskal pemerintah menyerahkan wewenang kepada daerah otonom untuk mengelolah keuangan daerah untuk menyeimbangkan keuangan melalui dana perimbangan.

4.4.5. Total Aset (ASSET) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa Total Aset (ASSET) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan, dan hipotesis ini diterima karena pada uji t nilai signifikan sebesar 0,050 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh penelitian Medelia dkk (2016) dan Putri (2015) mendapatkan bahwa ukuran daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan Pemda. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan penelitian Heriningsih dan Ruserlistyani (2013) dan Hilmi & Martani (2012) total aset menunjukkan secara statistik tidak signifikan. pemerintah Daerah yang ukuran besar maka Pemda tersebut memiliki total aset yang lebih besar. Besarnya total aset tersebut berarti Pemda memiliki item-item penyusun aset seperti aset tetap maupun aset lancar yang lebih banyak. Kondisi demikian memungkinkan pemerintah daerah akan mengungkapkan informasi keuangan yang lebih luas.

4.4.6. Jumlah Penduduk (POP) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil hipotesis ke enam (H6) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (POP) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, dan hipotesis ini ditolak. Karena pada uji t nilai signifikan sebesar 0,721 lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini konsisten pada penelitian yang dilakukan Afryansyah & Haryanto (2013) dan Hasanah (2016) menyatakan jumlah penduduk, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Hasil

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya Hendriyani dan Tahar (2015) mengemukakan bahwa Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan besarnya jumlah penduduk di suatu daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan pada situs resmi pemda.

4.4.7. Status Daerah (STAT) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil hipotesis ke tujuh (H7) menunjukkan bahwa Status Daerah (STAT) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, dan hipotesis ini diterima karena pada uji t nilai signifikan sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Abdullah (2004) dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2012) Menyatakan bahwa status daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Surhardjanto dan Yulianingtyas (2012) bahwa status daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah hal ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya. Karena Status daerah yang merupakan salah satu pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi kontrol sosial pada suatu daerah.

Status daerah yang merupakan salah satu pandangan bahwa status daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi kontrol sosial pada suatu daerah. Menurut kamus bahasa indonesia kota adalah daerah permukiman yang terdiri dari atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, dan pemusatan penduduknya dengan pendapatan yang tinggi serta fasilitas moderen dan sebagian besar penduduknya berkerja di luar pertanian. Hal menunjukkan adanya kota yang besar akan meningkatkan informasi keuangan di internet.

4.4.8. Opini Audit (OPINI) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Hasil hipotesis pertama (H8) menunjukkan bahwa Opini Audit (OPINI) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet, dan hipotesis ini ditolak karena pada uji t nilai signifikan sebesar 0,255 lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini sejalan dengan penelitian Wau (2015), Hendriyani & Tahar (2015) dan Heriningsih & Ruserlistyani (2013) bahwa Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Putri (2015) Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya opini WTP yang di dapat pada suatu daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan pada situs resmi pemda. Seharusnya opini WTP mencerminkan bahwa daerah tersebut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi Setandar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini membuktika banyaknya pemda yang mendapatkan opini audit dengan WTP tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan di internet. Hasil ini tidak sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan *e-government* mendorong seluruh Pemda untuk mengoptimalkan teknologi dan informasi. Internet sebagai salah satu media berbasis teknologi dan informasi yang andal dalam penyampaian informasi keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa seharusnya semakin baik kualitas laporan keuangan maka akan semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah.

5. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Sedangkan total aset dan status daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Dan variabel lain seperti belanja daerah, intergovernmental revenue, jumlah penduduk dan opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih rendah dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan di situs resmi pmda artinya pemerintah daerah masih mengabaikan tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Di harapkan kedepannya semua pemerintah kabupaten/kota melengkapi semua informasi keuangan di website resmi pemerintah daerah seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan bertujuan sebagai tanggungjawab pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dari keterbatasan penelitian ini maka untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa variabel baru yaitu perilaku masyarakat dan akses internet rumah tangga agar dapat mengukur umpan balik masyarakat akan tersedianya informasi keuangan di internet. Serta di harapkan menambah periode pengamatan yaitu 2016 – 2018 agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

6. REFERENSI

- [1] Afryansyah, R.D dan Haryanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Universitas Diponegoro Semarang. *Journal Of Accounting Volume 2*.
- [2] Abdullah, S. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agency Theory*. Paper di presentasikan pada Seminar Antarbangsa, Universitas Bengkulu, 4-5 Oktober 2004. Bengkulu.
- [3] Ghozali dan Chariri, 2016. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip, Jakarta
- [4] Hasanah, Uswatun. 2016. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet (Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Jurnal. niversitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- [5] Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Hilmi, A.Z dan Martani. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- [7] Hendriyani, Ririn dan Tahar, Afrizal. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 22, No. 1. Yogyakarta.
- [8] Heriningsih, Sucahyo dan Ruserlistyani. 2013. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pembangunan Nasional. Volume 13. Nomor 02*.
- [9] Hiola, Yustina. Rosidi. Mulawarman, Aji Edi. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Di Website Dengan Opini Audit Dan Lingkungan Politik Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Provinsi, Kota Dan Kabupaten Di Sulawesi). *Jurnal. Universitas Brawijaya*.

- [10] Heriningsih, Suchyo dan Ruserlistyani. 2013. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pembangunan Nasional. Volume 13. Nomor 02.*
- [11] Madelia, Mutiara 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Yang Ada Di Provinsi Jambi Tahun 2011-2013). *Jurnal. Universitas Jambi.*
- [12] Maulana, Candra. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Terdapat Di Pulau Jawa Tahun 2013). *Skripsi. Universitas Negeri Semarang.*
- [13] Medina, Febri. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi. Universitas Depok.*
- [14] Pandansari, Tiara. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Volume XIX No. 3.*
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian Nomo. 141/KMK.07/2001. 2001. Tentang sistem informasi keuangan daerah.
- [16] Puspita, Roro, dan Martani, Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Universitas Indonesia.*
- [17] Putri, Rizky Arinda. 2015. Faktor Karakteristik Dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. *Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro.*
- [18] Sari, Adelia Pramita. Martani, Dwi. Setyaningrum, Dyah. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.*
- [19] Setyaningrum, D. dan Syafitri, F. 2012 Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Indonesia. Vol. 9. No. 2.*
- [20] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [21] Suhardjanto, Djoko dan Yulianingtyas, R.R. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Jurnal. Universitas Sebelas Maret.*
- [22] Syoftia, Eljra. Puspa, Dwi Fitri. Ethika. 2016. Penaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal. Universitas Bung Hatta.*
- [23] Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
- [24] Wau, Ikhlas dan Ratnomo. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah. *Universitas Diponegoro Semarang. Journal Of Accounting Volume 4.*
- [25] Wilopo, Indara Agung. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui *Website*. *Jurnal. Ekonomi Syariah Indonesia. Universitas Alma Ata. Volume VII.*

- [26] Yuliant, fegy. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/Kota Di Indonesia). Skripsi. Universitas Lampung.

